

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Sampai akhir Oktober 2011 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah 23 bank dan 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor sebanyak 207. Secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah telah menjangkau masyarakat dilebih dari 120 kabupaten atau kota di 33 propinsi di Indonesia. Total aset per Oktober 2011 (*year-on-year*) telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan aset terbesar selama 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp 3,35 triliun sehingga total aset perbankan syariah sampai dengan Oktober 2011 telah mencapai Rp 130,5 triliun. *Marketshare* perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8% pada akhir 2011 (Outlook perbankan syariah 2012).

Tabel 1.1
Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

(Dalam Triliun Rupiah)

Perkembangan	Oktober 2010	Oktober 2011	Pertumbuhan	
			Nominal	Persentase (%)
Aset	85,85	127,19	41,34	48,10
Dana Pihak Ketiga (DPK)	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran Dana	83,81	122,73	38,92	46,43

Sumber: Outlook perbankan syariah tahun 2012

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia jika dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga juga semakin tinggi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Besarnya perhimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dari tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga terbesar adalah deposito dengan nominal Rp 62,02 triliun (61,06%), setelah itu tabungan dengan nominal Rp 27,81 triliun (27,38%) dan giro dengan nominal Rp 11,05 triliun (10,88%) (Outlook perbankan syariah 2012).

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
(Dalam Triliun Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	Oktober 2010		Oktober 2011		Pertumbuhan	
	Nominal	Share(%)	Nominal	Share(%)	Nominal	(%)
Total Dana Pihak Ketiga	66,48	100,00	101,57	100,00	35,10	52,79
Tabungan	19,33	29,07	27,81	27,38	8,49	43,93
-Wadiah	2,18		4,33		2,15	98,53
-Mudharabah	17,15		23,49		6,34	36,99
Deposito	39,23	59,01	62,02	61,06	22,79	58,11
Giro (wadiah)	7,12	10,70	11,05	10,88	3,94	55,31
Lainnya	0,81	1,22	0,69	0,68	(0,12)	(15,04)

Sumber: Outlook perbankan syariah tahun 2012

Pertumbuhan pesat baik dari sisi aset dan dana pihak ketiga ini dikarenakan respon positif masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah mulai memanfaatkan keberadaan bank syariah. Prinsip-prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam menjadikan perbankan syariah semakin diminati sehingga dari tahun ke tahun masyarakat semakin tertarik untuk menjadi nasabah serta untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan ini juga menjadikan timbulnya peluang serta persaingan antar bank syariah di Indonesia. Bahkan bank konvensional juga banyak yang membuka jasa perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah. Antar bank syariah bersaing untuk lebih

banyak menarik minat masyarakat Indonesia menggunakan persaingan nisbah bagi hasil serta menawarkan bebas biaya administrasi bulanan dan bebas tarik tunai di ATM.

Pertumbuhan aset yang semakin meningkat, serta peluang banyaknya masyarakat tertarik menggunakan jasa perbankan syariah dan persaingan antar bank syariah tidak terlepas dari adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal perbankan. Regulasi perbankan syariah dimulai dengan adanya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan direvisi menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, semakin diperbaiki dengan munculnya Undang-Undang No.23 tahun 1999 selanjutnya Undang-Undang No.3 tahun 2004 dan yang terbaru adalah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perubahan regulasi perbankan syariah semakin menambah kokoh perbankan syariah sehingga menjadikan jaringan perbankan syariah bertambah 6 Bank Unit Syariah (BUS) setelah lahirnya regulasi Undang-Undang No.21 tahun 2008. Pada tahun 2008 Bank Umum Syariah (BUS) hanya 5 bank, seiring dengan perkembangan perbankan syariah pada tahun berikutnya 2009 terdapat 6 Bank Umum Syariah (BUS), pada tahun 2010 terdapat penambahan 5 Bank Umum Syariah (BUS) hingga Oktober 2012 Bank Umum Syariah mencapai 11 bank. Jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah meningkat pesat dari tahun 2008 hanya 822 kantor hingga bulan Oktober 2012 mencapai 2.188 kantor. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BRPS) meningkat dari tahun 2008 sampai 2012 mencapai 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor 386 buah. Tabel 1.3 berikut menunjukkan secara detail perkembangan jaringan kantor bank syariah.

Tabel 1.3
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	Oktober 2012
Bank Umum Syariah (BUS)	5	6	11	11	11
Unit Usaha Syariah (UUS)	27	25	23	24	24
- Jumlah kantor BUS dan UUS	822	998	1.477	1.737	2.188
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	131	138	150	155	156
- Jumlah Kantor BPRS	202	225	286	364	386

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2012

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yaitu pada tahun 1997-1998 akibat dari gejolak politik dan ekonomi akibat utang swasta luar negeri yang jumlahnya sangat besar sehingga pada saat nilai uang rupiah lemah maka banyak perusahaan bangkrut juga sebagian jasa perbankan yang harus dilikuid, serta banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Pada tahun 2008 perekonomian dunia mengalami krisis global yang bermula dari negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Awal mula krisis ini ekonom Amerika yaitu Joseph E. Stiglitz mengingatkan adanya indikasi suku bunga yang rendah yang tergantung pada bisnis properti dan pengaturan industri keuangan yang longgar. Dan akhirnya kucuran kredit warga Amerika yang membeli rumah melalui kreditor nonbank (*sub-prime mortgage*) karena dengan mudahnya syarat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) padahal tingkat bunga KPR *sub-prime mortgage* lebih tinggi dari bunga bank. Sehingga raksasa institusi keuangan seperti Lehman Brothers membenamkan dana US\$60 milyar dan akhirnya bangkrut. Akibat hal tersebut Indonesia juga kena imbas dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Awalnya Lehman Brothers sebelum bangkrut nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.000 per dolar AS dan puncaknya nilai tukar rupiah menembus angka Rp 12.650 per dolar AS dan tingkat inflasi Indonesia menjadi 12,56% pada tahun 2008 (Bank Indonesia, 2011).

Dampak krisis global bagi dunia perbankan Indonesia yaitu Indonesia mengalami aliran dana keluar (*capital outflow*) secara besar-besaran karena tidak memberlakukan pinjaman dana nasabah secara keseluruhan sehingga likuiditas bank-bank kering dan mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Tiga (3) bank besar BUMN yang terkena dampaknya yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BNI Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk meminta bantuan likuiditas masing-masing Rp 5 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 15 triliun. Selain itu juga terdapat isu mengenai aksi *rush* pasca penutupan 16 bank pada tahun 1997/1998. *Rush* menurut George G. Kaufman dalam Iskandar S (2011), adalah banyaknya nasabah yang menarik dananya secara bersama-sama dan besar-besaran karena ketidakpercayaan bahwa bank mampu membayar dananya penuh dan tepat waktu. Bank menawarkan bunga deposito yang tinggi agar dapat menarik dana masyarakat dari bunga 6% menjadi bunga 12%. Menurut data Statistik Bank Indonesia per Desember 2008 laba bank-bank umum setelah pajak diperkirakan Rp 30,61 triliun dari bulan sebelumnya per November 2008 sebesar Rp 34,47 triliun mengalami penurunan laba sebesar Rp 3,86 triliun akibat beban biaya (*cost of funds*) yang semakin tinggi (Bank Indonesia, 2010).

Awal berdirinya bank syariah di Indonesia dimulai dengan munculnya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal saham Rp 106 milyar. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dalam menjalankan operasional usahanya tidak menggunakan instrumen bunga seperti bank-bank pada umumnya. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) menggunakan sistem syariah yaitu bank pertama yang menerapkan sistem bagi hasil dan tanpa

bunga. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia,Tbk (BMI) memberikan angin segar bagi perbankan khususnya terjadi ketika krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998.

Dampak dari adanya krisis moneter itu, tahun 1999 pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia melakukan likuidasi terhadap 38 bank, 7 bank diambil alih pemerintah dan 9 bank direkapitulasi. Krisis pada tahun 1997 tidak menyebabkan bank Muamalat Indonesia mengalami masalah keuangan yang sangat besar seperti halnya bank-bank konvensional pada saat itu yang bersistem bunga. Bank Muamalat Indonesia yang bersistem syariah berhasil keluar dari krisis dan kembali memperoleh keuntungan dan menambah permodalannya. Dengan ini membuktikan bahwa sistem perbankan syariah lebih unggul dan menjadi inspirasi bagi industri keuangan syariah untuk berkembang. Alasan bank muamalat terbebas dari krisis dikarenakan: (1) pada perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana *liquid* yang cukup untuk operasionalnya akibat dari tingginya suku bunga; (2) sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan *interest base* yang menempatkan uang sebagai komoditi dan; (3) perbankan konvensional kurang mengembangkan sektor riil karena lebih terfokus pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga (Report bank Muamalat, 20 Juni 2008).

Tidak hanya PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk (BMI) yang menjalankan prinsip-prinsip syariah tapi juga disusul oleh bank-bank konvensional yang menjalankan kegiatan operasionalnya berbasis syariah. Bank-bank tersebut dikonversikan menjadi bank-bank syariah baik secara penuh menjadi Bank Umum Syariah ataupun Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah. Bank Muamalat Indonesia,Tbk (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM)

merupakan beberapa contoh Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) contohnya adalah Bank Central Asia (BCA) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Sejarah perdirinya PT Bank Syariah Mandiri yaitu pada saat krisis moneter pada tahun 1997-1998 berdampak pada dunia perbankan nasional, yaitu dilakukan merger 4 (empat) bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu bank yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Setelah lahirnya PT Bank Mandiri (Persero) hasil dari merger tersebut pihak manajemen melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk memberikan layanan perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat peluang bank umum konvensional untuk dapat melayani transaksi ganda, baik transaksi konvensional dan syariah (*Dual Banking System*) dengan menggunakan Unit Usaha Syariah. Bank Susila Bakti (BSB) berganti nama setelah dikonversi menjadi bank syariah secara penuh dengan nama PT Bank Mandiri Syariah pada tahun 1999.

Untuk menilai seberapa efektif pengelola bank, peningkatan dan perkembangan suatu bank dapat dinilai dari kinerja keuangan yang dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Dengan analisis tersebut akan diketahui hasil-hasil kinerja yang telah dicapai di waktu lampau dan waktu yang sedang berjalan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan hasil-hasil yang cukup baik dari kinerja bank tersebut. Hal ini sangat membantu pihak manajemen untuk menetapkan kebijakan yang akan datang agar dalam penyusunan rencana untuk tahun ke tahun mendatang

kelemahan tersebut dapat diperbaiki dan hasil-hasil positif yang telah dicapai dapat dipertahankan.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah maka analisis yang dipakai adalah rasio CAMEL. CAMEL adalah singkatan dari C (*Capital*) yaitu Rasio permodalan yang dalam perbankan syariah diukur dengan Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM), Aset Produktif (*Asset*) yang dalam perbankan syariah diukur dengan Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), M (*Management*) yaitu manajemen bank, Rentabilitas (*Earning*) yang dalam perbankan syariah diukur dengan Rasio *Net Operating Margin* (NOM) dan yang terakhir Likuiditas (*Liquidity*) yang dalam perbankan syariah diukur dengan Rasio *Short Term Mismatch* (STM). Rasio CAMEL digunakan agar bank syariah dapat mengelola resiko bank secara efektif. Bagi pihak manajemen hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan untuk menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Bagi Bank Indonesia hasil penilaian tingkat kesehatan bank digunakan sebagai alat untuk mengawasi penerapan strategi pengawasan untuk masa yang akan datang. (Bank Indonesia,2007)

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faisol (2007) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Bank pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan rasio likuiditas pada tahun 2004, 2005 dan 2006 telah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% sehingga rasio *Reserve Requirement* dapat dikatakan baik. Rasio ROA dan ROE juga menunjukkan kecenderungan membaik serta Rasio Solvabilitas yang dihitung dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) baik sehingga dapat disimpulkan kinerja

keuangan bank Muamalat sudah baik. Dilanjutkan penelitian oleh Zuhroh (2009) yang berjudul “Analisis Kinerja Industri Perbankan Syariah pada tahun 2001-2005”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja yang baik dari pertumbuhan aset tertinggi dan dana pihak ketiga akumulasi (DPK). Selain itu dalam hal pendanaan positif konsisten dan kecenderungan peningkatan segmen pasar dan posisi di industri perbankan nasional relatif lebih rendah atau kurang dari 2%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Faizah (2010) yang berjudul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2006-2008 dengan Menggunakan Metode CAMEL”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor finansial CAMEL berada pada posisi dua dan faktor manajemen peringkat A. Jadi kesimpulannya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2006-2008 tergolong baik, dengan rata-rata berada diposisi kedua yang berarti Bank Muamalat Indonesia mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi ekonomi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Maharani (2010) yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Menggunakan Rasio Keuangan (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia periode 2003-2008)”. Hasil dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara bank sehat (kinerja baik) dengan bank yang tidak sehat (kinerja tidak baik) terutama variabel ROA yang menghasilkan f terbesar dan LDR yang menghasilkan f terkecil. Tingkat ketepatan yang dihasilkan oleh persamaan diskriminan dalam melihat bank yang sehat dan bank yang tidak sehat sebesar 100% dan kinerja keuangan perbankan syariah berbeda (tidak sama) dengan perbankan konvensional.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah, jika dilihat dari sisi usia masih lebih lama beroperasi daripada PT Bank Syariah Mandiri (BSM). PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998 sehingga PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) pernah diuji ketahanannya, sedangkan PT Bank Syariah Mandiri belum mengalami kondisi krisis moneter karena PT Bank Syariah Mandiri berdiri akibat adanya krisis moneter (Profil Bank Syariah Mandiri). Bank Mandiri Syariah (BSM) adalah bank konvensional pertama yang merupakan hasil konversi sehingga menjadi bank umum syariah secara penuh setelah ada peraturan pembukaan bank konvensional yang membolehkan untuk melakukan layanan syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) sudah merupakan perusahaan jasa pelayanan perbankan yang sudah *go public* sedangkan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) belum menjadi perusahaan jasa pelayanan perbankan yang *go public*. Jika dilihat dari total aset sampai akhir tahun 2011 Bank Mandiri Syariah mempunyai aset lebih besar dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri asetnya sebesar Rp 48.672 milyar (Laporan Keuangan bank syariah mandiri, 2011) sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) mempunyai aset sebesar Rp 32.479 milyar (Laporan Keuangan bank muamalat Indonesia, 2011). Penulis ingin membandingkan kinerja dari sisi kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMEL antara kedua bank umum syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT Bank Mandiri Syariah sebelum dan sesudah menghadapi krisis global pada tahun 2008.

Berdasarkan pemaparan di atas maka judul dari penelitian ini adalah “Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Antara PT Bank Muamalat Indonesia,

Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri dengan Menggunakan Rasio CAMEL Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Global pada tahun 2008”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dengan menggunakan rasio CAMEL sebelum dan sesudah krisis ekonomi global tahun 2008 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan menggunakan rasio CAMEL sebelum dan sesudah krisis ekonomi global pada tahun 2008 ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMEL pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum dan sesudah krisis ekonomi global pada tahun 2008 ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMEL antara PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum dan sesudah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2011. Penelitian ini hanya dibatasi pada aspek keuangan saja tanpa menyertakan aspek *Management*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dengan menggunakan rasio CAMEL sebelum dan sesudah krisis ekonomi global tahun 2008.
2. Mengetahui kinerja keuangan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan menggunakan rasio CAMEL sebelum dan sesudah krisis ekonomi global pada tahun 2008.
3. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMEL pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum dan sesudah krisis ekonomi global pada tahun 2008.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manajemen Bank

Dapat dijadikan informasi bagi bank dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perbankan dalam hal pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih maju dan pesat.

2. Investor dan nasabah

Dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menentukan perbankan syariah mana yang mempunyai kinerja yang lebih bagus sehingga investor dan nasabah tidak salah pilih.

3. Masyarakat akademis

- a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbankan syariah.